

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis secara menyeluruh pada kutipan langsung sampel berita rubrik Aspirasi Keistimewaan *SKH Kedaulatan Rakyat* periode 15 Januari-12 Maret 2011 terkait opini *public figure* Yogyakarta tentang mekanisme kepemimpinan DIY, peneliti kemudian memaparkan temuan-temuan yang peneliti peroleh sebagai berikut:

1. Kelompok *public figure* yang banyak mengemukakan opininya dalam rubrik Aspirasi Keistimewaan adalah pemimpin kelompok masyarakat. Adanya dominasi kemunculan pemimpin kelompok masyarakat dalam rubrik Aspirasi Keistimewaan dipengaruhi oleh kedudukannya sebagai pemimpin sebuah kelompok masyarakat di DIY, dimana masyarakat-masyarakat yang menjadi anggotanya menginginkan agar aspirasinya dapat diakomodir melalui pemimpinnya.
2. *Public figure* dalam rubrik Aspirasi Keistimewaan lebih banyak mengemukakan opininya dalam bentuk saran. Hal ini menjelaskan bahwa dalam merespon stimulus yang ada yakni permasalahan mekanisme kepemimpinan DIY, narasumber lebih memilih untuk mengungkapkan dengan pemberian opini berupa saran atau harapan kepada pihak yang terkait dalam masalah ini. Ini menunjukkan terdapat harapan para *public figure* Yogyakarta yang tertuang dalam saran dalam opininya, agar saran yang kemukakan dapat dipahami oleh pihak yang dituju Pihak-pihak tersebut

misalnya pemerintah pusat selaku pembuat kebijakan dan yang menginginkan mekanisme pemilihan, Sultan HB X selaku gubernur DIY yang ingin ditetapkan jabatannya oleh masyarakat DIY, serta kepada masyarakat DIY yang mendukung penetapan. Saran tersebut antara lain ditujukan kepada:

- a. Saran kepada Pemerintah Pusat dalam hal ini DPR sebagai pembuat kebijakan, dimana saran tersebut berisi tentang saran kepada pemerintah pusat agar mengikuti keinginan masyarakat DIY melaksanakan penetapan Sultan sebagai gubernur di DIY.
- b. Saran kepada Sultan HB ke X agar mengundurkan diri dari aktivitas partai politik jika dirinya menginginkan masyarakat tetap memberikan dukungan terhadap dirinya untuk tetap menjadi gubernur DIY.
- c. Saran kepada masyarakat Yogyakarta yang mendukung penetapan Sultan agar tetap memegang teguh prinsip, fokus serta konsisten mendukung penetapan.

Berdasarkan keterkaitan antara isi opini dan identitas *public figure* didapat hasil bahwa sebagian besar opini yang disampaikan narasumber berupa saran lebih banyak disampaikan oleh akademisi yakni sebanyak 6 narasumber dari total 14 narasumber yang mengemukakan sarannya. Hal ini karena akademisi cenderung memiliki referensi pengetahuan yang lebih luas sehingga juga memiliki pertimbangan yang baik sehingga dapat dengan benar mengetahui situasi yang tengah berlangsung dalam masyarakat untuk kemudian memberikan sarannya. Dengan saran yang dikemukakan,

narasumber yang sebagian besar adalah akademisi berharap agar semua pihak yang terkait dalam permasalahan ini dapat bertindak sesuai dengan kepentingan masyarakat bukan pada kepentingan pribadi atau golongan tertentu.

3. Opini yang dikemukakan *public figure* dalam rubrik Aspirasi Keistimewaan lebih banyak menunjukkan dukungannya terhadap penetapan gubernur dan wakil gubernur DIY. Hal lain yang dapat diketahui dari hasil pengkodean adalah bahwa *public figure* yang ditentukan KR sebagai narasumber tidak sepenuhnya memberikan dukungan atau pro kepada penetapan Sri Sultan HB X sesuai dengan misi yang hendak dicapai KR yakni “mengegalkan” penetapan. Hal ini ditunjukkan dengan terdapatnya 4 narasumber berita yang menyatakan kenetralannya dalam permasalahan kepemimpinan ini.

Berdasarkan keterkaitan antara arah opini dan identitas *public figure* didapat hasil bahwa sebagian besar opini dalam kutipan langsung rubrik Aspirasi Keistimewaan yang mendukung penetapan adalah narasumber (*public figure*) dengan identitas sebagai pemimpin kelompok masyarakat sebanyak 13 narasumber. Hal ini mengisyaratkan bahwa sebagai pemimpin dari kelompok masyarakat, narasumber yang adalah *public figure* Yogyakarta cenderung pro terhadap penetapan gubernur dan wakil gubernur. Selain alasan demografi yakni sebagai masyarakat Yogyakarta, pemimpin kelompok masyarakat juga merupakan pemimpin dari masyarakat Yogyakarta yang sebagian besar menginginkan penetapan Sultan. Seorang pemimpin akan cenderung menyuarakann opini dari anggotanya.

4. Sebagian besar narasumber (*public figure* Yogyakarta) memiliki pemahaman bahwa penetapan harus dilakukan jika ingin mengamalkan nilai-nilai demokrasi pancasila yang mengutamakan suara rakyat. Demokrasi juga dipahami oleh narasumber sebagai musyawarah untuk mufakat. Oleh karena itu, jika sebagian besar masyarakat DIY telah sepakat untuk menetapkan pemimpin daerahnya, maka hasil dari kesepakatan tersebut adalah wujud dari nilai demokrasi yang ditunjukkan oleh masyarakat DIY.

Berdasarkan keterkaitan antara alasan penetapan dan identitas *public figure* didapat hasil bahwa identitas *public figure* sebagai pejabat, pemimpin kelompok masyarakat, dan akademisi cenderung memberikan alasan atas penetapan gubernur yaitu sebagai cerminan demokrasi pancasila di DIY tidak terlepas dari tanggungjawab kapasitas kerja masing-masing narasumber yang berhubungan langsung dengan masyarakat, sehingga narasumber tersebut dianggap dekat dan memahami persoalan yang dialami masyarakat berkaitan dengan penetapan gubernur dan wakil gubernur.

B. Saran

Penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan dari segi kedalaman analisis. Untuk penelitian sejenis akan memperoleh hasil yang lebih mendalam dan kaya jika dilakukan analisis pada tingkat konteks yakni dengan wawancara mendalam pada pihak media maupun narasumber berita. Hal ini dikarenakan pada penelitian ini peneliti hanya menggunakan kutipan langsung dalam berita sebagai indikator untuk meneliti opini narasumber sehingga hasil yang diperoleh pun sangat terbatas. Dengan didukung oleh penelitian pada tingkat konteks

(wawancara mendalam dengan narasumber berita dan media) diharapkan mampu memperkaya hasil penelitian dengan temuan-temuan yang tidak dapat dijangkau oleh level teks.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Anto, J. dan Pemilianna P. 2007. *Meretas Jurnalisme Damai di Aceh, Kisah Reintegrasi dari Lapangan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Baskoro, Haryadi. dan Sudomo Sunaryo. 2010. *Catatan Perjalanan Keistimewaan Yogya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Frey, Lawrence R, Carl H. Botan, Paul G. Friedman, Gary L. Koops.1991. *Investigating Communication: An Introducing To Research Methods*. New jersey: Prentice Hall
- Ishwara, Luwi. 2005. *Catatan-Catatat Jurnalisme Dasar*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas
- Kriyantono, Rachmat. 2007. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Prenada Media Group
- Nasution, Zulkarimen. 1989. *Komunikasi Politik Suatu Pengantar*. Jakarta: Ghalia Indah
- Nimmo, Dan. 1989. *Komunikasi Politik: Khalayak dan Efek*. Bandung: Remadja Karya Offset
- Peorwadarminta, WJS. 2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Sastropoetro, Santoso. 1990. *Pendapat Publik, Pendapat Umum, Dan Pendapat Khalayak Dalam Komunikasi Sosial*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset
- Soemirat, Betty dan Eddy Yehuda. 2008. *Opini Publik*. Jakarta: Universitas terbuka
- Sumadiria, Haris. 2006. *Bahasa Jurnalistik: Panduan Praktis Penulis dan Jurnalis*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media

Skripsi:

- Lidwina Chometa Halley Eprilianty. 2009. *Framing Opini Masyarakat tentang Polemik Jabatan Gubernur DIY dalam Koran Lokal DIY*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Skripsi

Lungguh Ginanjar Iswara. 2010. *Pencitraan Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam SKH Kedaulatan Rakyat*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Skripsi

Dimas Utami Kusumaningrum. 2010. *Opini Publik dalam Rubrik SMS Warga tentang Kualitas Pelayanan Publik*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Skripsi



Lampiran 1

TABEL 9

*Coding Sheet Analisis Isi Opini Public Figure Yogyakarta tentang
Mekanisme Kepemimpinan DIY pada Rubrik Aspirasi Keistimewaan SKH
Kedaulatan Rakyat Periode 15 Januari 2011-12 Maret 2011*

Media : SKH Kedaulatan Rakyat
Pengkode : :

No.	Isi							Arah			Alasan Penetapan							Narasumber							
	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8
1.																									
2.																									
3.																									
4.																									
5.																									
6.																									
7.																									
8.																									
9.																									
10.																									
11.																									
12.																									
13.																									
14.																									
15.																									
16.																									
17.																									
18.																									
19.																									
20.																									
21.																									
22.																									
23.																									
24.																									
25.																									
26.																									
27.																									
28.																									
29.																									
30.																									
31.																									
32.																									

Lampiran 2

TABEL 10
Uji reliabilitas untuk unit analisis Identitas *Public Figure*

No.	Judul Berita	Peneliti	Koder I	Koder II
1.	Keistimewaan Tanpa Penetapan, Semu	2	2	2
2.	Penetapan, Cermin Demokrasi Pancasila	2	2	2
3.	Penetapan DIY Tidak Bisa Ditawar	3	3	3
4.	Suara Masyarakat Harus Diapresiasi	7	7	7
5.	Kraton dan Masyarakat Sudah Menyatu	3	3	3
6.	Rakyat Membela Mati-Matian	3	3	3
7.	Efektifnya Implementasi Kebijakan Publik	3	3	3
8.	Pemilihan Langsung Terlalu Mahal	2	2	2
9.	Warisan Sejarah Harus Dipelihara	2	2	2
10.	Pemilihan Belum Tentu Lebih Baik	3	3	3
11.	Keistimewaan Sebaiknya Dirembuk	3	3	3
12.	Kondisi Tenang Jangan 'Diutak-atik'	3	3	3
13.	Demokrasi Tak Harus 'Seragam'	3	3	3
14.	Yogya Asuh Bayi NKRI	2	2	2
15.	Demokrasi Yogya Tonjolan Loyalitas	4	4	4
16.	Kraton Menjadikan Warga Tionghoa Nyaman	2	2	2
17.	Penetapan Sesuai Kehendak Rakyat	2	2	2
18.	Penetapan Sudah Kesepakatan Rakyat DIY	2	2	2
19.	Demokrasi di DIY Simbol Kearifan	1	1	1
20.	Serahkan Warga DIY untuk Menentukan	2	2	2
21.	Demokrasi Tak Harus Pemilihan	1	1	1
22.	Yogya Jangan 'Diotak-atik'	7	7	7
23.	Pemilihan Tak Menjamin Hasilnya Baik	7	7	7
24.	Keistimewaan Yogya, Sejarah Panjang	1	1	1
25.	Musyawahar Juga Demokrasi	2	2	2
26.	Jangan Lucuti Keistimewaan Yogya	7	7	7
27.	Energi Tak Kenal Lelah	4	4	4
28.	Percobaan Risakan untuk NKRI	7	7	7
29.	Pemilihan Langsung Belum Tentu Lebih Baik	3	3	3
30.	Ikuti Keinginan Masyarakat DIY	8	8	8
31.	Penetapan, Demokrasi Paling 'Halus'	3	3	3
32.	Citra Istimewa setelah Penetapan	5	5	5
33.	Pemilihan Bisa Kurangi Nilai Sejarah	2	2	2
34.	Penetapan, Demokrasi Rakyat Yogya	3	3	3
35.	Pemerintah Pusat Ngotot, Bisa Merepotkan	3	3	3
36.	Kraton Dukung Iklim Usaha Kondusif	1	1	1
37.	Dengar Suara Rakyat Yogya	2	2	2
38.	Gelisah Kalau Belum Penetapan	6	6	6
39.	Penetapan, Yogya Kondusif	2	2	2

40.	Demokrasi Kedepankan Musyawarah Mufakat	1	1	1
41.	Jangan Lupakan SG-PAG	5	5	5
42.	Kepastian Penetapan, Ditunggu Pengusaha	2	2	2
43.	Keistimewaan Ada Argumennya	1	1	1
44.	Demokrasi Tak Harus Pemilihan	3	3	3

Sumber: Coding Sheet

Keterangan: 1=Pejabat, 2=Pemimpin Kelompok masyarakat, 3=Akademisi, 4=Pengusaha, 5=Praktisi, 6=Seniman, 7=Pengamat/ahli, 8=Mantan Pejabat

Uji reliabilitas antara peneliti dan pengkoding I:

$$\begin{aligned}
 \text{Reliability/CR} &= \frac{2M}{N1+N2} \\
 &= \frac{2(44)}{44+44} \\
 &= 1
 \end{aligned}$$

Uji reliabilitas antara peneliti dan pengkoding II:

$$\begin{aligned}
 \text{Reliability/CR} &= \frac{2M}{N1+N2} \\
 &= \frac{2(44)}{44+44} \\
 &= 1
 \end{aligned}$$

TABEL 11
Uji reliabilitas untuk unit analisis Isi Opini

No.	Judul Berita	Peneliti	Koder I	Koder II
1.	Keistimewaan Tanpa Penetapan, Semu	1	1	1
2.	Penetapan, Cermin Demokrasi Pancasila	3	3	3
3.	Penetapan DIY Tidak Bisa Ditawar	2	2	1

4.	Suara Masyarakat Harus Diapresiasi	4	4	1
5.	Kraton dan Masyarakat Sudah Menyatu	1	1	1
6.	Rakyat Membela Mati-Matian	5	3	3
7.	Efektifnya Implementasi Kebijakan Publik	3	3	3
8.	Pemilihan Langsung Terlalu Mahal	5	5	3
9.	Warisan Sejarah Harus Dipelihara	3	3	3
10.	Pemilihan Belum Tentu Lebih Baik	3	3	5
11.	Keistimewaan Sebaiknya Dirembuk	3	3	3
12.	Kondisi Tenang Jangan 'Diutak-atik'	3	3	3
13.	Demokrasi Tak Harus 'Seragam'	5	5	5
14.	Yogya Asuh Bayi NKRI	5	5	2
15.	Demokrasi Yogya Tonjolan Loyalitas	2	2	2
16.	Kraton Menjadikan Warga Tionghoa Nyaman	2	2	2
17.	Penetapan Sesuai Kehendak Rakyat	5	5	5
18.	Penetapan Sudah Kesepakatan Rakyat DIY	5	1	5
19.	Demokrasi di DIY Simbol Kearifan	3	3	3
20.	Serahkan Warga DIY untuk Menentukan	6	6	6
21.	Demokrasi Tak Harus Pemilihan	1	1	4
22.	Yogya Jangan 'Diotak-atik'	7	6	7
23.	Pemilihan Tak Menjamin Hasilnya Baik	4	4	4
24.	Keistimewaan Yogya, Sejarah Panjang	5	6	5
25.	Musyawahar Juga Demokrasi	2	2	2
26.	Jangan Lucuti Keistimewaan Yogya	3	3	3
27.	Energi Tak Kenal Lelah	6	3	6
28.	Percobaan Risakan untuk NKRI	4	4	4
29.	Pemilihan Langsung Belum Tentu Lebih Baik	6	4	1
30.	Ikuti Keinginan Masyarakat DIY	7	7	7
31.	Penetapan, Demokrasi Paling 'Halus'	2	2	2
32.	Citra Istimewa setelah Penetapan	2	2	6
33.	Pemilihan Bisa Kurangi Nilai Sejarah	4	4	4
34.	Penetapan, Demokrasi Rakyat Yogya	6	6	3
35.	Pemerintah Pusat Ngotot, Bisa Merepotkan	3	3	3
36.	Kraton Dukung Iklim Usaha Kondusif	2	2	2
37.	Dengar Suara Rakyat Yogya	3	3	5
38.	Gelisah Kalau Belum Penetapan	3	3	3
39.	Penetapan, Yogya Kondusif	2	2	2
40.	Demokrasi Kedepankan Musyawarah Mufakat	3	3	3
41.	Jangan Lupakan SG-PAG	4	6	4
42.	Kepastian Penetapan, Ditunggu Pengusaha	3	3	3
43.	Keistimewaan Ada Argumennya	6	6	6
44.	Demokrasi Tak Harus Pemilihan	3	3	3

Sumber: Coding Sheet

Keterangan: 1=Kritik, 2=Pujian, 3=Saran, 4=Kritik dan Pujian, 5=Kritik dan Saran, 6=Pujian dan Saran, 7=Kritik, Pujian, dan Saran

Uji reliabilitas antara peneliti dan pengkoding I:

$$\begin{aligned} \text{Reliability/CR} &= \frac{2M}{N1+N2} \\ &= \frac{2(37)}{44+44} \\ &= 0,84 \end{aligned}$$

Uji reliabilitas antara peneliti dan pengkoding II:

$$\begin{aligned} \text{Reliability/CR} &= \frac{2M}{N1+N2} \\ &= \frac{2(33)}{44+44} \\ &= 0,75 \end{aligned}$$

TABEL 12
Uji reliabilitas untuk unit analisis Arah Opini

No.	Judul Berita	Peneliti	Koder I	Koder II
1.	Keistimewaan Tanpa Penetapan, Semu	1	1	1
2.	Penetapan, Cermin Demokrasi Pancasila	1	1	1
3.	Penetapan DIY Tidak Bisa Ditawar	1	1	1
4.	Suara Masyarakat Harus Diapresiasi	1	1	1
5.	Kraton dan Masyarakat Sudah Menyatu	1	1	1
6.	Rakyat Membela Mati-Matian	1	1	1
7.	Efektifnya Implementasi Kebijakan Publik	1	1	1
8.	Pemilihan Langsung Terlalu Mahal	1	1	1
9.	Warisan Sejarah Harus Dipelihara	3	3	3
10.	Pemilihan Belum Tentu Lebih Baik	3	3	1

11.	Keistimewaan Sebaiknya Dirembuk	3	3	3
12.	Kondisi Tenang Jangan 'Diutak-atik'	1	1	1
13.	Demokrasi Tak Harus 'Seragam'	1	1	1
14.	Yogya Asuh Bayi NKRI	1	1	1
15.	Demokrasi Yogya Tonjolkan Loyalitas	1	1	1
16.	Kraton Menjadikan Warga Tionghoa Nyaman	1	1	1
17.	Penetapan Sesuai Kehendak Rakyat	1	1	1
18.	Penetapan Sudah Kesepakatan Rakyat DIY	1	1	1
19.	Demokrasi di DIY Simbol Kearifan	1	1	1
20.	Serahkan Warga DIY untuk Menentukan	1	1	1
21.	Demokrasi Tak Harus Pemelihan	1	1	1
22.	Yogya Jangan 'Diotak-atik'	1	1	1
23.	Pemilihan Tak Menjamin Hasilnya Baik	1	1	1
24.	Keistimewaan Yogya, Sejarah Panjang	1	1	1
25.	Musyawarah Juga Demokrasi	1	1	1
26.	Jangan Lucuti Keistimewaan Yogya	1	1	1
27.	Energi Tak Kenal Lelah	1	1	1
28.	Percobaan Risakan untuk NKRI	1	1	1
29.	Pemilihan Langsung Belum Tentu Lebih Baik	1	1	1
30.	Ikuti Keinginan Masyarakat DIY	1	1	1
31.	Penetapan, Demokrasi Paling 'Halus'	1	1	1
32.	Citra Istimewa setelah Penetapan	1	1	1
33.	Pemilihan Bisa Kurangi Nilai Sejarah	1	1	1
34.	Penetapan, Demokrasi Rakyat Yogya	1	1	1
35.	Pemerintah Pusat Ngotot, Bisa Merepotkan	3	3	3
36.	Kraton Dukung Iklim Usaha Kondusif	1	1	1
37.	Dengar Suara Rakyat Yogya	1	1	1
38.	Gelisah Kalau Belum Penetapan	1	1	1
39.	Penetapan, Yogya Kondusif	1	1	1
40.	Demokrasi Kedepankan Musyawarah Mufakat	1	1	1
41.	Jangan Lupakan SG-PAG	1	1	1
42.	Kepastian Penetapan, Ditunggu Pengusaha	1	1	1
43.	Keistimewaan Ada Argumennya	1	1	1
44.	Demokrasi Tak Harus Pemilihan	1	1	1

Sumber: Coding Sheet

Keterangan: 1=Pro Penetapan, 3=Netral

Uji reliabilitas antara peneliti dan pengkoding I:

Reliability/CR= 2M

N1+N2

$$= \frac{2(44)}{44+44}$$

$$= 1$$

Uji reliabilitas antara peneliti dan pengkoding II:

$$Reliability/CR = \frac{2M}{N1+N2}$$

$$= \frac{2(43)}{44+44}$$

$$= 0,97$$

TABEL 13
Uji reliabilitas untuk unit analisis Alasan Penetapan

No.	Judul Berita	Peneliti	Koder I	Koder II
1.	Keistimewaan Tanpa Penetapan, Semu	1	3	1
2.	Penetapan, Cermin Demokrasi Pancasila	3	3	3
3.	Penetapan DIY Tidak Bisa Ditawar	2	3	3
4.	Suara Masyarakat Harus Diapresiasi	6	7	6
5.	Kraton dan Masyarakat Sudah Menyatu	5	5	5
6.	Rakyat Membela Mati-Matian	5	5	5
7.	Efektifnya Implementasi Kebijakan Publik	6	3	5
8.	Pemilihan Langsung Terlalu Mahal	1	1	1
9.	Warisan Sejarah Harus Dipelihara	0	0	0
10.	Pemilihan Belum Tentu Lebih Baik	0	0	3
11.	Keistimewaan Sebaiknya Dirembuk	0	0	0
12.	Kondisi Tenang Jangan 'Diutak-atik'	4	4	4
13.	Demokrasi Tak Harus 'Seragam'	3	3	3
14.	Yogya Asuh Bayi NKRI	2	2	2
15.	Demokrasi Yogya Tonjolkan Loyalitas	4	4	4
16.	Kraton Menjadikan Warga Tionghoa Nyaman	4	4	4
17.	Penetapan Sesuai Kehendak Rakyat	3	3	3

18.	Penetapan Sudah Kesepakatan Rakyat DIY	4	4	4
19.	Demokrasi di DIY Simbol Kearifan	3	3	3
20.	Serahkan Warga DIY untuk Menentukan	5	5	5
21.	Demokrasi Tak Harus Pemelihan	3	3	7
22.	Yogya Jangan 'Diotak-atik'	4	4	4
23.	Pemilihan Tak Menjamin Hasilnya Baik	2	3	2
24.	Keistimewaan Yogya, Sejarah Panjang	2	2	2
25.	Musyawarah Juga Demokrasi	2	2	2
26.	Jangan Lucuti Keistimewaan Yogya	1	1	2
27.	Energi Tak Kenal Lelah	5	5	5
28.	Percobaan Risakan untuk NKRI	2	2	2
29.	Pemilihan Langsung Belum Tentu Lebih Baik	4	4	3
30.	Ikuti Keinginan Masyarakat DIY	3	3	3
31.	Penetapan, Demokrasi Paling 'Halus'	3	3	3
32.	Citra Istimewa setelah Penetapan	7	7	7
33.	Pemilihan Bisa Kurangi Nilai Sejarah	5	5	2
34.	Penetapan, Demokrasi Rakyat Yogya	1	1	3
35.	Pemerintah Pusat Ngotot, Bisa Merepotkan	0	0	0
36.	Kraton Dukung Iklim Usaha Kondusif	2	2	2
37.	Dengar Suara Rakyat Yogya	3	3	3
38.	Gelisah Kalau Belum Penetapan	0	0	0
39.	Penetapan, Yogya Kondusif	2	2	4
40.	Demokrasi Kedepankan Musyawarah Mufakat	3	3	4
41.	Jangan Lupakan SG-PAG	2	2	2
42.	Kepastian Penetapan, Ditunggu Pengusaha	6	6	6
43.	Keistimewaan Ada Argumennya	1	1	1
44.	Demokrasi Tak Harus Pemilihan	3	4	3

Sumber: Coding Sheet

Keterangan: 0=Tidak menyebutkan dan arah netral, 1=Merupakan inti keistimewaan DIY, 2=Alasan kesejarahan, 3=Cerminan demokrasi Pancasila, 4=Jaminan situasi kondusif, aman dan tentram, 5=Figur/personal Sultan HB X, 6=Mendorong peningkatan perekonomian daerah, 7=Lain-lain

Uji reliabilitas antara peneliti dan pengkoding I:

$$\text{Reliability/CR} = \frac{2M}{N1+N2}$$

$$= \frac{2(38)}{44+44}$$

$$= 0,86$$

Uji reliabilitas antara peneliti dan pengkoding II:

$$\begin{aligned} \text{Reliability/CR} &= \frac{2M}{N1+N2} \\ &= \frac{2(33)}{44+44} \\ &= 0,75 \end{aligned}$$

Lampiran 4

Transkrip wawancara peneliti dengan redaksi SKH Kedaulatan Rakyat, Kamis 23 Juni 2011, pukul 21:00 di kantor Redaksi SKH Kedaulatan Rakyat.

Peneliti: Bagaimana alur pembuatan rubrik Aspirasi Keistimewaan?

Ronny: Tanggung jawabnya dari redaksi, dari pimpinan redaksi sampai ke bawah Itu kebijakan bersama. Kemudian ditunjuklah Bapak Priswolo sebagai pengampuh rubrik. Setiap jam 7 malam diadakan rapat redaksi dimana dalam rapat itu akan ditunjuk siapa yang akan menjadi narasumber. Setelah melakukan wawancara, reporter akan menuliskan hasil wawancaranya kemudian dikumpulkan kepada pengampu rubrik untuk dikoreksi

Peneliti: Bentuk berita dalam rubrik Aspirasi Keistimewaan?

Ronny: Ini adalah *straight news* dengan wawancara khusus. Ini bukan *event* tapi berita adalah hasil wawancara khusus. Wawancara khusus tapi tayangannya dalam bentuk rubrik. Rubrik yang diadakan secara tematis. Mengikuti kebutuhannya. Rubrik sejenis itu bisa diciptakan setiap saat, jika merasa tidak perlu ya tidak dibuat.

Peneliti: Latar belakang pembuatan rubrik?

Ronny: Karena kita merasa punya tanggungjawab, kita sama-sama orang jogja. Tapi untuk ide itu tergantung korannya saja. Jadi kita sebagai orang jogja, harus punya tanggungjawab untuk mengangkat masalah keistimewaan sebagai isu yang penting. Mungkin koran lain menganggap tidak penting tapi tidak apa-apa. Walaupun sama-sama koran jogja. Jadi tidak harus mengikuti koran lain. Itu merupakan rubrik eksklusif yang kita ciptakan sendiri. Mungkin orang lain punya ide yang lain.

Peneliti: Apakah terdapat kualifikasi tertentu terhadap pemilihan narasumber yang ditampilkan di rubrik Aspirasi Keistimewaan?

Ronny: Yang ditampilkan hanyalah tokoh masyarakat atau *public figure*, seperti misalnya pengacara, pengusaha, ketua paguyuban yang punya *massa*. Punya kemampuan untuk menjelaskan keistimewaan Jogja itu seperti apa. Misalnya narasumbernya adalah pengusaha, berarti seorang pengusaha menganggap keistimewaan itu penting maka yang akan mendukung adalah pengusaha. Ini adalah penugasan reporter untuk mewawancari narasumber tapi sebelumnya narasumber akan diarahkan.

Peneliti: Apakah pertanyaan untuk setiap narasumber adalah sama?

Ronny: Bisa iya, bisa tidak. Misalkan arahan kita kepada reporter itu seperti ini, tapi gak boleh kaku, kita bekal dengan empat pertanyaan, dalam perkembangan dia bisa berkembang bagus tergantung narasumbernya pintar ngomong atau gak. Kalo gak ya dikasi pertanyaan empat ya, cuma empat itu saja. Setelah itu ya selesai. Jadi ketika kita menugaskan itu kita gak tau yang terjadi nanti akan seperti apa. Yang tau adalah reporter yang melakukan wawancara langsung.

Peneliti: Bagaimana tentang pemilihan penulis atau reporter rubrik pak?

Ronny: Untuk topik semacam itu kita bentuk tim ya. Untuk penugasan wawancara kita akan menunjuk orang dalam team itu. Jadi hanya orang yang dalam team itu yang akan melakukan peliputan. Demikian juga dengan berita lainnya, misalnya berita tentang merapi kemarin.

Peneliti: Bagaimana dengan placement rubrik Aspirasi keistimewaan ini pak?

Ronny: Kalau untuk rubrik ini kita hanya meletakkan pada rubrik Kota(halaman 2), Lingkar Yogya, dan DIY. Hal ini karena rubriknya tentang Jogja dan yang ngomong adalah orang Jogja jadi *placement*nya disesuaikanlah dengan isinya.

Peneliti: Siapa yang menentukan judul untuk setiap artikel berita yang dimuat?

Ronny: Reporter boleh menentukan judul tapi yang menentukan adalah pengasuhnya atau redaktornya. Dalam hal ini pak Prisololo. Karena kepentingan redaktur dan reporter itu berbeda. Tapi redaktur pelaksana juga berhak merubah judul yang telah ditentukan oleh redaktur. Intinya, setiap orang yang berada di atasnya berhak mengganti judul yang akan diberikan. Namun untuk masalah isi tidak akan diganti karena yang paling tahu adalah reporternya. Isi yang baku adalah isi yang berasal dari reporter. Redakturpun gak berani merubah isinya. Redaktur hanya bisa melakukan pengeditan, misalnya untuk kalimat yang tidak masuk akal, redaktur akan segera melakukan konfirmasi kepada reporter yang ditugaskan. Termasuk di dalamnya petikan langsung yang dibuat oleh reporter. Redaktur hanya bertugas mengoreksi aja. Redaktur tidak akan merubah isinya.

Peneliti: Apakah ada hal yang mempengaruhi pemilihan narasumber selain faktor “public figure” nya?

Ronny: Oh tidak ada..Walaupun dia adalah seorang wanita namun dia *concern* pada RUUK ya tidak apa-apa, atau dia adalah seorang pengacara tapi dia adalah seorang yang *concern* pada keistimewaan DIY ya gak apa-apa itu bisa dijasikan narasumber.

Peneliti: Apakah sebelumnya pernah ada komplain dari pembaca mengenai isi dari rubrik?

Ronny: Belum ada. Yang ada adalah usul. Misalnya ada yang minta narasumber berasal dari kaum tertentu misalnya..Semua isi dari rubrik ini kita yang menentukan melalui rapat *budgeting*.

Peneliti: Apakah ada pertimbangan tersendiri mengenai time frame atau periode penerbitan rubrik Aspirasi Keistimewaan?

Ronny: semuanya sesuai momentum saja. Tapi untuk khusus rubrik ini tidak menutup kemungkinan besok masih ada lagi. Semuanya disesuaikan dengan momentum saja. Rubrik ini juga tidak rutin terbit setiap hari dalam selang waktu dua bulan itu karena dipengaruhi oleh masalah teknis.

Peneliti: Kalau dicermati isi dari rubrik ini cenderung mengarah kepada penetapan, walaupun ada beberapa yang mengungkapkan sikap netral. Apakah ada narasumber yang ketika diwawancarai pendapatnya adalah penelitian?

Ronny: Ini merupakan strategi media saja. Media punya misi apalagi *KR* adalah koran Jogja, jadi kita punya misi “mengegolkan” penetapan. Jadi jika ada yg bertanya, jadi *KR* itu tidak netral? Mana ada koran yang netral? Semuanya sah-sah saja, hanya bagaimana dia menyodorkan fakta itu dan diterima oleh masyarakat. Berpihak kepada siapa itu pilihan. Dengan pilihan itu kita harus berani ditinggalkan oleh orang-orang yang tidak suka. Kalo independen ya, tapi saya tidak yakin ada koran yang netral.

